



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Setelah latar belakang penelitian di jelaskan, maka selanjutnya akan di jelaskan teori-teori yang mendukung isi dari penelitian ini. Teori-teori yang akan dijelaskan antara lain penjelasan tentang Teori keagenan, Manajemen laba, Mekanisme *Good Corporate Governance*, kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit. Selain itu akan ada data tentang penelitian terdahulu yang menjadi data pembanding penelitian ini.

Manfaat dari Kajian Pustaka yang ada di bab ini ialah sebagai alat bantu dalam melihat teori-teori yang ada dan telah berkembang di masyarakat. Selain itu, akan lebih memahami tentang hal-hal apa saja yang akan di bahas dalam penelitian ini.

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Teori Keagenan

Teori keagenan mencoba menjelaskan hubungan antara *agent* (manajemen) dan *principal* (pemilik usaha) yang disebut juga dengan hubungan keagenan (*agency relationship*). Teori tentang hubungan keagenan ini bertujuan untuk memahami *corporate governance* lebih dalam. Menurut Jensen dan Meckling(1976:308), hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manager (*agent*) dengan investor (*principal*). Jensen dan Meckling(1976;308) juga menyatakan bahwa terdapat dua macam bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham dan antara manajer dan pemberi pinjaman. Pemisahan antara kepemilikan dan pe'ngendalian perusahaan merupakan salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik kepentingan yang disebut dengan konflik keagenan. (Zhuang:2000) dalam Jamaan (2008:7) menyatakan bahwa konflik keagenan yang terjadi dalam



perusahaan bukan saja antara pemegang saham dengan manajer tetapi juga antara

◉ pemegang saham yang mengendalikan manajemen dan pemegang saham dalam jumlah kecil yang tidak bisa secara efektif mengendalikan manajemen.

Eisenhardt (1989:58) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

Manajer berhak memberikan mengungkapkan informasi berupa laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut sangatlah penting bagi para pengguna eksternal. Apabila manajer memiliki informasi yang lebih banyak daripada pemegang saham maka tidak dapat dipungkiri bahwa manajer dapat melakukan kecurangan dan melakukan praktik manajemen laba untuk meningkatkan keuntungannya sendiri.

Teori agensi menyatakan bahwa konflik kepentingan ini dapat dikurangi dengan adanya metode pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak di perusahaan. Mekanisme pengawasan yang dimaksud dalam teori keagenan ini adalah dengan penerapan mekanisme *corporate governance*.

*Corporate governance* diharapkan bisa menjadi alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Penerapan *corporate governance* juga dapat memberikan kepercayaan terhadap kinerja manajemen dalam mengelolah kekayaan pemilik (pemegang saham), sehingga dapat meminimalkan konflik kepentingan dan biaya keagenan (*agency cost*). *Good Corporate Governance* menghasilkan berbagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen sudah

selaras dengan kepentingan pemegang saham Susiana dan Herawaty(2007:8)

## 2. Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan cara-cara untuk mengolah laba sesuai dengan tujuan tertentu (laba bisa naik atau turun sesuai dengan kebutuhan). Dengan demikian dapat dikatakan laporan keuangan yang mengandung unsur manajemen laba itu tidak berintegritas atau dengan kata lain laporan keuangan tersebut tidak mengandung kualitas *reliability*.

Manajemen laba merupakan tindakan yang sulit dihindari. Manajemen laba terjadi ketika para manajer menggunakan pertimbangan mereka dalam pelaporan keuangan dan struktur transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan menyesatkan beberapa pemegang kepentingan mengenai kondisi kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil-hasil kontraktual yang bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan Belkaoui(2011:75). Manajemen laba diukur dengan menggunakan *Discretionary Accrual* yang dihitung dengan menselisihkan total accrual dan *Nondiscretionary Accrual* dengan menggunakan model Jones.

Perusahaan pada umumnya melakukan praktek manajemen laba. Manajemen laba belum tentu selalu bermakna negatif. Praktek manajemen laba dikatakan bermakna negative apabila manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan semata-mata hanya demi kepentingan beberapa pihak sementara pihak lain merasa dirugikan. Manajemen laba yang bersifat oportunistik hanya mementingkan kepentingan manajer saja sehingga tindakan manajemen laba yang dilakukan dapat merugikan kepentingan pihak lain khususnya stakeholders. Manajemen laba dikatakan efisien apabila tindakan manajemen laba yang dilakukan berpihak terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepentingan *stakeholder* bukan semata-mata demi kepentingan manajemen perusahaan.

Menurut Septiyanto(2012:16) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen laba, salah satunya adalah mekanisme *corporate governance*. Pada penelitian ini, mekanisme *corporate governance* hanya menggunakan empat faktor, yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit.

### 3. Mekanisme Corporate Governance

Istilah *Good Corporate Governance* atau *Corporate Governance* memang sudah tidak asing lagi dikalangan umum. Pengertian *good corporate governance* pun beragam dan belum menemukan kesepakatan dari berbagai pihak tentang arti dari *good corporate governance* ini. Pertama kali istilah *corporate governance* diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* pada tahun 1992, dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report* . Sekarang ini ada banyak pengertian tentang *corporate governance* dari berbagai sumber seperti di bawah ini:

1. *Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. (Forum for *Corporate Governance* in Indonesia / FCGI).
2. *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh suatu organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika (Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002).

3. Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana(2011:101) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, peegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.

4. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2011:102) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai

*“The structure through which shareholders, directors, managers, set of the board objectives of the company, the means of attaining those objective and monitoring performance.”*

“Suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja.”

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat diketahui bahwa pengertian

*Good Corporate Governance* yang disampaikan oleh OECD dapat mewakili pengertian dalam arti sempit, sedangkan pengertian yang diberikan oleh FCGI dan Sukrisno Agoes dan ICenik Ardana (2011) dapat mewakili pengertian *Good Corporate Governance* dalam arti luas.

Konsep *Good Corporate Governance* memperjelas dan mempertegas makanisme hubungan antara para pemangku kepentingan di dalam suatu organisasi. OECD mencoba mengembangkan beberapa prinsip *corporate governance* yang akan menjadi sebuah acuan dan pedoman sebuah perusahaan saat melakukan praktek *corporate governance*. Prinsip – prinsip dalam OECD mencangkup lima

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bintang utama, yaitu: hak-hak para pemegang saham (*stockholders*) dan perlindungannya, peran para karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), pengungkapan yang tepat waktu dan akurat, transparansi terkait dengan struktur dan operasi perusahaan, pemegang saham, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Maka secara ringkas prinsip – prinsip tersebut dapat dirangkum menjadi:

1. *Fairness* (Kewajaran), dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak – hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.
2. *Transparency* (Transparansi), dalam mewujudkan transparansi ini perusahaan harus dapat menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan.
3. *Accountability* (Akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4. *Responsibility* (Pertanggung jawaban), yaitu kesesuaian dalam melakukan pengolahan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
5. *Independency* (Kemandirian), suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporat yang sehat.

Penerapan konsep *corporate governance* merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan yang telah hilang karena maraknya kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi belakangan ini. Salah satunya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



adalah saat krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia , dimana buruknya kinerja

perusahaan besar yang merupakan perusahaan publik yang telah terdaftar di bursa.

Buruknya kinerja ini disebabkan karna manupulasi dan kecurangan lainnya yang dilakukan oleh para eksekutif perusahaan-perusahaan tersebut. Oleh sebab itu untuk mendapatkan kembali para investor, perusahaan-perusahaan sekarang ini menerapkan praktik *Good Corporate Governance* di perusahaan, karena tujuan dari penerapan praktik ini adalah mengurangi tindakan manipulasi dan kecurangan pada pelaporan keuangan dan kinerja perusahaan. Yang dapat di pelajari dari Cadbury report Aspek Keuangan Tata Kelola Perusahaan Divisi tanggung jawab utama tidak seorang pun memiliki kekuatan keputusan , Mayoritas direktur non-eksekutif independen Setidaknya tiga non-eksekutif di komite audit (awasi akuntansi / pelaporan keuangan) Mayoritas non-eksekutif di komite remunerasi Non-eksekutif untuk dipilih oleh seluruh dewan " . Menurut Tjager dalam Sukrisno dan I Cenic Ardana (2011:106) setidaknya ada lima alasan mengapa penerapan *corporate governance* itu bermanfaat, yaitu:

1. Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh McKinsey&Co. menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan *Good Corporate Governance*.
2. Berdasarkan berbagai analisis, ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan.
3. Internasionalisasi pasar-termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal-menuntut perusahaan menerapkan *Good Corporate Governance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Kalaupun *Good Corporate Governance* bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis, sistem ini dapat menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang kini telah banyak berubah.
5. Secara teoritis, praktik *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa praktek *corporate governance* yang baik (*Good Corporate Governance*) akan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang mementingkan kepentingan pribadi, serta dapat meningkatkan kepercayaan para investor.

Untuk meningkatkan kualitas sebuah laporan keuangan, sistem *corporate governance* tetap perlu pengawasan pemegang saham dan tanggung jawab manajemen. Selain itu pengawasan pihak internal maupun eskternal pun diperlukan. Pengawasan internal bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan pemilik. Di sisi lain kepemilikan pihak luar, monitoring *debtholder*, dan peraturan pemerintah merupakan mekanisme pengawasan eksternal yang bertujuan untuk membantu pengawasan internal dalam melakukan pengawasan yang efektif.

Ujiyantho dan Pramuka (2007:6) melakukan penelitian mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba dan konsekuensi manajemen laba terhadap kinerja keuangan. Mekanisme *corporate governance* yang mereka gunakan adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris. Dari hasil analisis

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* (kepemilikan manajerial)

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan

#### a. Kepemilikan Institusional

Melalui proses monitoring secara efektif, kepemilikan institusional mampu untuk mengendalikan pihak manajemen sehingga dapat mengurangi tindakan manajemen laba. Bushee(1998:7) menyatakan keberadaan investor institusional dapat mengurangi insentif para manajer yang bertindak mengutamakan kepentingan sendiri. Selain itu, investor institusional merupakan investor yang berpengalaman sehingga dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan dan tidak mudah diperdaya oleh manajer seperti tindakan memanipulasi. Menurut Bukhori(2012:9) kepemilikan institusional merupakan presentase jumlah saham pada akhir periode akuntansi yang dimiliki pihak eksternal, seperti lembaga, perusahaan, asuransi, bank atau institusi lain. Keberadaan investor institusional dapat menunjukkan *Corporate Governance* yang kuat yang bisa digunakan untuk memonitor perusahaan pada umumnya dan manajemen pada khususnya. Tindakan *monitoring* tersebut dapat menjamin kemakmuran untuk pemegang saham dan dapat membatasi perilaku para manager dalam pengendalian dan pengambilan keputusan.

Adanya *monitoring* yang efektif oleh pihak institusional menyebabkan penggunaan utang menurun. Hal ini karena peranan utang sebagai salah satu alat *monitoring* sudah diambil alih oleh kepemilikan institusional. Tindakan *monitoring* oleh pihak investor institusional dapat mengurangi perilaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

*opportunistic* atau mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh manajer sehingga manajer dapat lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan.

Pemegang saham institusional memiliki pengaruh yang sangat penting pada manajer perusahaan dan juga dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan para pemegang saham. (Nesbitt) dalam Jamaan (2008:14) menemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor institusional dapat membatasi perilaku para manajer. Dengan adanya pengawasan ini menurunkan motivasi manager untuk melakukan manajemen laba.

#### **b. Kepemilikan Manajemen**

Arief & Bambang(2007:7) mendefinisikan kepemilikan manajerial sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan yang meliputi komisaris dan direksi. Kepemilikan saham oleh perusahaan merupakan mekanisme yang dapat digunakan agar pengelola melakukan aktivitas sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Persentase kepemilikan saham ini merupakan persentase saham yang dimiliki oleh manajemen termasuk didalamnya persentase saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi menurut Susiana & Herawaty( 2007:8).

Kepemilikan saham manajerial dapat membantu menyatukan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, yang berarti semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

kinerja perusahaan tersebut. Dengan demikian manajer akan termotivasi untuk menyiapkan laporan keuangan yang berintegritas dan menurunkan tindakan manajemen laba. Adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat menjadi salah satu upaya dalam mengurangi masalah keagenan dengan manajer dan menyelaraskan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham.

Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain dirinya sendiri. Kepemilikan perusahaan juga terkait dengan pengendalian operasional perusahaan. Dengan semakin besarnya kepemilikan manajer, maka manajer dapat lebih leluasa dalam mengatur pemilihan metode akuntansi, serta kebijakan-kebijakan akuntansi penting terkait dengan masa depan perusahaan.

### c. Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Menurut peraturan yang di keluarkan BEI jumlah komisaris independen proposional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris. Komisaris Independen juga harus memahami undang-undang dan peraturan pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam rapat umum para pemegang saham menurut (Pohan;2008) dalam Utomo (2014:22).

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait.

Ada dua pendapat yang saling bertentangan tentang komposisi komisaris independen disebuah perusahaan. Menurut (Kurnasih dan Seregar;2007) dalam Utomo (2014:23) mengatakan ukuran dan komposisi dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan, sedangkan menurut Yermarck dalam Utomo (2014:23) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki jumlah anggota dewan komisaris independen sedikit mendapat penilaian dari pasar, di samping itu kinerja keuangan juga lebih baik pada beberapa perusahaan yang memiliki jumlah anggota dewan komisaris independen.

Menurut Weisbach (1988:596), komisaris independen dalam suatu perusahaan harus benar-benar independen sehingga dapat menolak pengaruh, intervensi dan tekanan dari pemegang saham utama yang memiliki kepentingan tertentu. Sebagai bagian dari organ pengawasan, komisaris independen diharapkan memiliki perhatian dan komitmen penuh dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Untuk itu komisaris independen perusahaan merupakan orang-orang yang memiliki pengetahuan, kemampuan, waktu dan integritas yang tinggi.

Adanya komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Jika perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas,

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

karena didalam perusahaan terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak pihak-pihak diluar manajemen perusahaan.

#### d. Komite Audit

Menurut Astria(2011:44) struktur organisasi perusahaan adalah konsep yang dibuat guna meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervisi berkala terhadap kinerja perusahaan dan menjamin akuntabilitas kerja manajemen. Komite audit bertujuan untuk membantu dewan komisaris dan dewan direksi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab. Oleh sebab itu sangat penting untuk perusahaan memiliki komite audit. Komite audit memiliki tugas untuk melakukan pengawasan proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal, sehingga kegiatan perusahaan dapat berjalan secara efektif dan meminimalkan terjadinya tindakan manipulasi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen.

(Mayangsari;2003) dalam Utomo (2014:24) mengatakan bahwa komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan akuntansi dan pengendalian intern. Tujuan pembentukan komite audit:

1. Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi umum.
2. Memastikan bahwa kontrol internalnya memadai.
3. Tindak lanjut adanya dugaan penyimpangan yang material di bidang keuangan dan implikasinya hukumnya.
4. Merekomendasikan seleksi auditor eksternal.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Kualifikasi terpenting dari komite audit terletak pada *common sense*, kecerdasan, dan pandangan independen. Maka komite audit akan mengurangi pengukuran yang tidak tepat, pengungkapan akuntansi yang tidak tepat, dan berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan ilegal.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah Penelitian yang dilakukan sebelum Penulis melakukan penelitian :

1. Nama Peneliti : Mayangsari (2003)

Variabel Dependen :Integritas Laporan Keuangan

Variabel Independen : Independensi, Kualitas Audit, Kepemilikan

institusional,Kepemilikan Manajerial, Komite Audit,

dan komisaris independen

Sampel dan Populasi : Perusahaan Publik periode 1998-2002





Hasil Penelitian : Kualitas audit berpengaruh positif terhadap integritas

**C** laporan keuangan.

2. Nama Peneliti : Siallagan dan Machfoed (2006)

Variabel Dependen : Manajemen Laba

Variabel Independen : Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran dewan direksi

Hasil Penelitian : kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan

3. Nama Peneliti : Susiana dan Herawaty (2007)

Variabel Dependen : Integritas Laporan Keuangan

Variabel Independen : Independensi, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Komite Audit, Komisaris Independen, Kualitas Audit

Sampel dan Populasi : Perusahaan

Hasil Penelitian : Penelitian ini menghasilkan hasil bahwa independensi auditor, mekanisme corporate governance dan kualitas audit memiliki pengaruh yang tidak signifikan (negatif) terhadap integritas laporan keuangan.

4. Nama Peneliti : Jama'an (2008)

Variabel Dependen : Integritas Laporan Keuangan

Variabel Independen : Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Kantor Akuntan Publik

Sampel dan Populasi : Perusahaan publik yang listing di BEJ

Hasil Penelitian : menemukan pengaruh antara mekanisme corporate governance (kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit) serta kualitas kantor akuntan publik menunjukkan hasil yang positif signifikan

5. Nama Peneliti : Dewa Gede dan Wayan (2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Variabel Dependen : Manajemen Laba

Variabel Independen : Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional

Sampel dan Populasi : Perusahaan Manufaktur di BEI

Hasil penelitian : kepemilikan manajerial berpengaruh negatif pada manajemen laba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

### C. Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini, akan dijelaskan hubungan antara kepemilikan institusional terhadap manajemen laba, hubungan antara kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba, hubungan antara proporsi dewan komisaris independen terhadap manajemen laba, hubungan antara proporsi komite audit terhadap manajemen laba. Selanjutnya akan ditetapkan hipotesis yang menjadi dasar dari kerangka berfikir penulis dalam melakukan penelitian ini.

#### 1. Hubungan antara Kepemilikan Institusional dengan Manajemen Laba

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo; 2008). Pengaruh investor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



institusional terhadap manajemen perusahaan penting untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan para pemegang saham.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku mementingkan diri sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh (Mitra;2002), (Koh;2003), dan Pratana dan (Mas'ud;2003) dalam Jamaan(2008:13) menemukan bahwa kehadiran kepemilikan institusional yang tinggi membatasi manajer untuk melakukan pengelolaan laba dan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat meningkatkan *monitoring* terhadap perilaku manajer dalam mengantisipasi manipulasi yang mungkin dilakukan sehingga dapat menurunkan tindakan manajemen laba.

## **2 Hubungan antara Kepemilikan Manajerial dengan Manajemen Laba**

Jensen dan Meckling dalam Jamaan (2008:7) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Meningkatnya proporsi saham yang dimiliki oleh manajer akan mengurangi resiko tindakan manipulasi.

Kepemilikan saham oleh manajerial yang besar akan mengikut sertakan manajer secara langsung untuk merasakan manfaat dari keputusan yang telah diambil dan menanggung konsekuensi pengambilan keputusan yang salah. Kepemilikan oleh manajer dapat menentukan kebijakan dan pengambil keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Dengan demikian, manajer pada perusahaan yang memiliki persentase

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepemilikan manajerial akan cenderung memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menjalankan perusahaan, mengambil keputusan terbaik untuk kesejahteraan perusahaan, dan melaporkan laporan keuangan dengan informasi yang benar dan tidak akan melakukan manipulasi dalam melaporkan kinerja keuangan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan.

**3 Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**3 Hubungan antara Proporsi Komisaris Independen dengan Manajemen Laba**

Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat menjadi penyeimbang dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mengurangi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan manajemen. (Beasley:1996) dalam Jamaan (2008:13) menyarankan bahwa masuknya dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan, meningkatkan efektifitas dewan tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan laporan keuangan.

Menurut (Fama dan Jensen;1983) dalam Jamaan (2008:14) komisaris independen dapat menjadi penengah apabila terjadi perselisihan diantara manajer internal dan mengawasi kebijakan-kebijakan manajer serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang memenuhi *good corporate governance* dan mengurangi resiko kecurangan yang dapat dilakukan manajemen terhadap laporan keuangan sehingga dalam hal ini komisaris independen dapat membantu menurunkan kemungkinan terjadinya tindakan manajemen laba.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### 4. Hubungan antara Proporsi Komite Audit dengan Manajemen Laba

Menurut keputusan Menteri BUMN Nomor 117/Tahun 2000, Undang-undang BUMN Nomor 19/2003, pembentukan komite audit merupakan sebuah keharusan. Komite audit merupakan salah satu faktor yang penting dalam sebuah perusahaan. Komite audit juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mekanisme *corporate governance*. Komite audit harus merupakan orang-orang yang individu yang bebas dari kegiatan sehari-hari perusahaan agar tidak terpengaruh saat melakukan kontrol dan harus memiliki pengalaman agar dalam melakukan fungsi pengawasan dapat berjalan secara efektif.

Menurut Siallagan dan Machfoedz(2006:6) Komite audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat oportunistik manajemen yang melakukan manajemen laba dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal. Selain itu Komite Audit juga bertanggung jawab terhadap dewan komisaris.

Maka salah satu cara yang dilakukan untuk mempertahankan independensi dengan membentuk komite audit didalam sebuah perusahaan. Sesuai dengan fungsi dari komite audit itu sendiri dimana memastikan bahwa laporan keuangan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum, maka sedikit banyaknya keberadaan dan efektifitas komite audit dalam dapat meningkatkan kualitas laba melalui pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit eksternal. Maka keberadaan Komite audit akan mengurangi tindakan manajemen laba yang terjadi diperusahaan.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



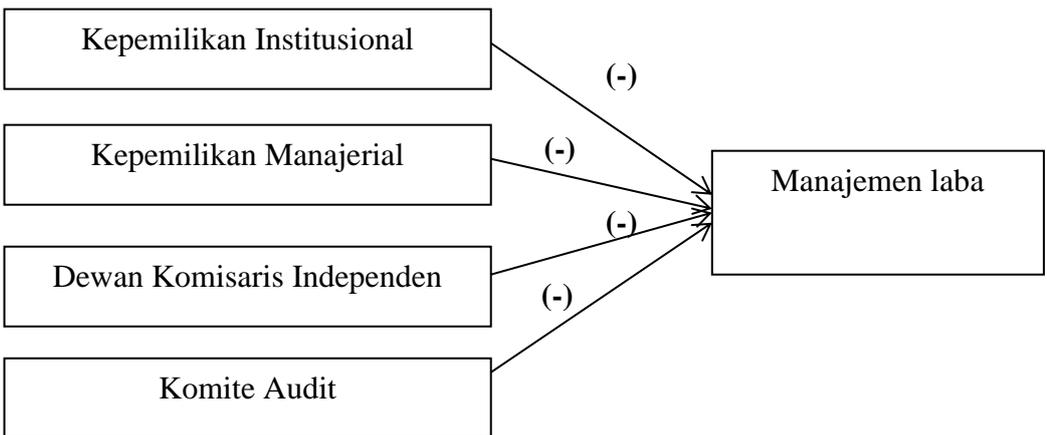
**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**



**D. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :



- Hak 1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba.
- Hak 2 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba.
- Hak 3 : Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba.
- Hak 4 : Ukuran Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba.

**© Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.